

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang penelitian

Untuk bisa bersaing dengan kota lainnya, setiap kota harus menimbulkan keunggulan bersaing, salah satu di antaranya menerapkan sistem informasi. Sistem informasi merupakan keunggulan bersaing, yang bisa menciptakan peluang baru dalam hidup. Apabila Indonesia ingin bersaing dengan negara lain, maka Indonesia harus mampu menciptakan suatu inovasi di bidang sistem informasi. Saat ini, Kota Bandung telah memelopori suatu inovasi dalam dunia teknologi informasi. Kota Bandung mempunyai sistem birokrasi yang terintegrasi secara *Information Technology* (IT) yang bernama *Bandung Integrated Resources Management System* (BIRMS).

Mungkin bagi sebagian orang, belum mengenal dengan baik pembuatan anggaran berbasis digital. Dengan adanya anggaran, maka perusahaan bisa membuat dari *planning* sampai dengan *controlling* suatu kebijakan keuangan perusahaan. BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*) ini merupakan inovasi yang sangat diperlukan oleh Kota Bandung, karena melalui sistem ini, seluruh perencanaan sampai penyerapan anggaran akan diketahui melalui program asli buatan anak Bandung tersebut. Ini merupakan suatu terobosan yang diciptakan anak Bandung dalam mengembangkan kota Bandung dari segi teknologi. Teknologi yang mendasar mulai ditemukan sejak tahun 1980

dan mulai berkembang pada tahun 2000-an hingga saat ini, dan telah memberikan dampak yang besar dalam dunia sistem informasi.

Dengan demikian, BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*) adalah salah satu contoh perkembangan teknologi informasi yang berkembang dan inovasi anak Bandung yang membuat urusan semua birokrasi bisa terintegrasi secara IT (*Information Technology*), mulai dari perencanaan. Menurut Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Dulu disinyalir ada ketidaksesuaian dan pernah dikritik soal perencanaan dan pelaksanaan. Dengan adanya program ini dapat terlacak rencana dan penyerapan anggarannya. Sekarang sistemnya sudah *online* dan terpantau. Pada sistem BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*), bisa juga dipakai untuk proses pengadaan lelang barang e-procurement. Bahkan sistem kontrak pun sudah online untuk menghindari penjumlahan antara pengembang dan aparat *Progress* bisa terlihat secara terpusat, sehingga tidak ada rapat-rapat mengejar data.

Walikota mendapat penghargaan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) *award*, dan BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*) diadopsi program nasional, makanya staf walikota sering jadi narasumber oleh kota lain. Walikota unggul IT (*Information Technology*), memang harus punya potensi dan melalui sistem BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*), semua kegiatan bisa diselesaikan dengan cepat dan akurat. Namun sistem ini, sementara hanya untuk komunikasi internal SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Komitmennya seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak boleh tidak ikutan.

Sistem BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*) ini juga akan diadopsi diprogram nasional, dalam hal ini akan diaplikasikan ke seluruh wilayah di Indonesia. Karena melalui BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*) ini akan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakatnya, seperti yang sudah dikatakan oleh wali kota Bandung bahwa dengan adanya BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*) akan mengkoneksikan seluruh perencanaan hingga penyerapan anggaran yang akan diketahui secara transparan oleh publik. Oleh karena itu, sangat akan lebih baik jika semua kota menerapkan sistem BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*) ini.

Tata kelola pemerintahan secara manual selama ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan administratif, kesalahan prosedur dan seringkali berujung pada berbagai permasalahan hukum, penurunan motivasi kerja, inisiatif dan kreativitas aparatur birokrasi serta menjadi salah satu penyebab kinerja anggaran/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tidak dapat optimal.

Dengan diterapkannya sistem birokrasi yang terintegrasi secara *Information Technology* (IT) bernama *Bandung Integrated Resources Management System* (BIRMS) ini pastinya pemerintah kota Bandung memiliki tujuan yang hendak dicapai, di antaranya mengenai integrasi data keuangan yaitu untuk mengintegrasikan data keuangan, sehingga *top management* bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan dengan lebih baik dan standarisasi proses operasi dengan menstandarkan proses operasi melalui implementasi *best practice* sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi dan peningkatan kualitas.

Sistem BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*) ini diharapkan dapat menjadi motor utama dalam peningkatan kinerja anggaran, serta diharapkan dapat membawa perubahan *mindset* dan budaya kerja yang mendasar di lingkungan pemerintahan daerah, sehingga dapat bermanfaat dalam mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dalam pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), serta meningkatnya kinerja pelayanan kepada publik.

Selanjutnya, standarisasi data dan informasi dalam menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan dari beberapa unit kerja yang beragam, keuntungan yang dapat diukur yakni dengan peningkatan *service level*, peningkatan kendali keuangan (*financial control*) penurunan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi. Ini adalah sebagian kecil dari dibentuknya dan diterapkannya sistem BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*) di kota Bandung.

Menurut Kepala BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kota Bandung Gunadi Sukma Bhinekas, dengan diresmikannya urusannya BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*) ini, kedepan urusan integrasi di Kota Bandung akan terintegrasi secara IT, mulai dari perencanaan anggaran hingga penyerapan anggaran, akan diketahui dengan mudah hanya dengan mengakses situs [www.birms.go.id](http://www.birms.go.id). Dalam pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktivitas birokrasi dari hulu hingga ke hilir dengan memanfaatkan IT (*information technology*) dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.

Sebelumnya, implementasi BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*) dilakukan secara terbatas hanya beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) saja, hal tersebut untuk menguji sejauh mana fleksibilitas dan keunggulan yang dimiliki BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*) sebagai *back office system* dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran. Penggunaan teknologi tersebut perlu ditunjang perubahan *mindset* alat yang tidak memberikan dampak signifikan, karena itu diperlukan keseimbangan antara teknologi, *business process*, dan sumber daya manusia sebagai penggerak inti teknologi informasi itu sendiri.

Menurut Kepala Bidang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Salman Fauzi, BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*) merupakan langkah-langkah antisipatif dan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas manajemen pengendalian APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) melalui implementasi sistem tata kelola anggaran secara elektronik dan terintegrasi, dalam hal ini untuk memenuhi fungsinya BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*) didesain seefektif mungkin guna menghimpun informasi yang *valid* segala aktifitas pelaksanaan anggaran diseluruh level fungsi, yakni fungsi BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*) merupakan alat bantu kebijakan internal (*back office system*).

BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*) di desain seefektif mungkin agar dapat menghimpun informasi yang valid dan mampu merekam segala aktivitas pelaksanaan anggaran di seluruh paket pekerjaan dan diseluruh level fungsi antara lain : informasi laporan keuangan, data asset dan

kinerja pegawai. Pada akhirnya, BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*) terimplementasi sebagai sistem perencanaan dan pengendalian anggaran proyek yang terintegrasi dengan berbagai fungsi pengendalian anggaran lain diluar proyek. BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*) berfungsi sebagai alat bantu pembuat kebijakan dalam memutuskan berbagai kebijakan internal dalam rangka meningkatkan efektifitas pembangunan di daerah dan pelayanan kepada publik.

Tujuan utama dari seluruh sistem BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*) ini adalah untuk memudahkan pimpinan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung dalam mengambil kebijakan anggaran dan memantau seluruh penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah serta untuk memudahkan penyusunan pertanggungjawaban Walikota Bandung yang akurat, akuntabel dan transparan.

## **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh *usefulness AIS* dan *ease of use AIS* terhadap BIRMS *information system acceptance*?
- b. Apakah *usefulness AIS* dan *ease of use AIS* terhadap BIRMS *information system acceptance* berpengaruh secara parsial?
- c. Apakah *usefulness AIS* dan *ease of use AIS* terhadap BIRMS *information system acceptance* berpengaruh secara simultan?

### **1.3. Maksud dan tujuan penelitian**

#### **1.3.1. Maksud penelitian**

Maksud dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui pengaruh *usefulness AIS* dan *ease of use AIS* terhadap BIRMS (*Bandung Integrated Resources Management System*) *information system acceptance*, baik secara simultan maupun parsial di BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Adapun tujuan penelitian diantaranya:

#### **1.3.2. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk :

- a. Untuk menjelaskan pengaruh *usefulness AIS* dan *ease of use AIS* terhadap BIRMS *information system acceptance*?
- b. Untuk menjelaskan *usefulness AIS* dan *ease of use AIS* terhadap BIRMS *information system acceptance* berpengaruh secara simultan?
- c. Untuk menjelaskan *usefulness AIS* dan *ease of use AIS* terhadap BIRMS *information system acceptance* berpengaruh secara parsial?

### **1.4. Kegunaan penelitian**

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

#### **1.4.1. Kegunaan pengembangan ilmu**

Peneliti ini merupakan salah satu cara untuk melakukan analisis terhadap fenomena yang dikaitkan dengan teori yang ada. Peneliti berharap penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis sebagai berikut :

- a. Dapat bermanfaat bagi pengembangan teori untuk bidang ilmu akuntansi terutama dalam sistem informasi akuntansi.
- b. Dapat bermanfaat untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari, serta menambah wawasan tentang manfaat sistem informasi akuntansi, kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi terhadap penerimaan masyarakat.
- c. Dapat dijadikan pengetahuan tambahan di bidang sistem informasi akuntansi terutama dalam pembahasan tentang manfaat sistem informasi akuntansi, kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi terhadap penerimaan masyarakat, serta dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian dan bahan kepustakaan atau sumber pengetahuan wawasan dengan masyarakat luas pada umumnya.

#### **1.4.2. Kegunaan operasional**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan secara praktis sebagai berikut :

- a. Bagi instansi

Hasil penelitian ini dapat menghimpun informasi sebagai sumbangan pemikiran untuk dijadikan referensi, serta masukan guna meningkatkan manfaat sistem informasi akuntansi, kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi terhadap penerimaan masyarakat dari sistem informasi yang digunakan.

b. Bagi perusahaan

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan dapat menjadi masukan mengenai manfaat sistem informasi akuntansi, kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi terhadap penerimaan masyarakat.

c. Bagi investor

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan apabila ingin berinvestasi untuk sistem informasi di perusahaan.

## **1.5. Lokasi dan waktu penelitian**

### **1.5.1. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian di BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) yang beralamatkan di Jalan Tamansari No 76 Bandung.

### **1.5.2. Waktu penelitian**

Waktu penelitian dimulai sejak september hingga desember 2014.

